

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Vol 6 No 1 Tahun 2024, p 202-211

Article

Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance Di Era Digital

Sri Yulianti Mozin¹, Vivi Venti Vera Sulila², Adityan N. Yusuf³

¹²³Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

* Correspondensi Penulis: yulmozin@ung.ac.id

Abstract: *This study, entitled "Public Participation Messages in Achieving Good Governance in the Digital Era," aims to analyze how public participation through digital media can improve the quality of good governance in Indonesia. The background to this research is based on the rapid development of information technology, which has encouraged the formation of new participatory spaces between the public and the government. Research data shows a significant increase in public digital participation, from 40% in 2015 to 85% in 2023, with a projection of 90% by 2025. This coincides with an increase in the good governance index from 50% to 85% during the same period (BPS, 2023; Ministry of Communication and Information, 2024). The method used in this study is a qualitative descriptive approach with secondary data analysis techniques from various official sources such as We Are Social, BPS, and the Ministry of Communication and Information. The theory used refers to Dwiyanto's (2020) perspective on the principles of participation, accountability, and transparency in governance, as well as the opinions of Sukamto (2021) and Rahman & Yuliana (2022) regarding the importance of digital participation as an effective means of public communication. The research results show a positive correlation between increased public digital participation and improvements in the good governance index. Digital media is an effective means for the public to express their aspirations, monitor public policies, and strengthen government transparency and accountability. However, this study also identified challenges in the form of a digital divide and low digital literacy in rural areas (Hidayat, 2023). In conclusion, public participation in the digital era plays a strategic role in realizing good governance. Inclusive policies and equitable access to technology are needed so that all levels of society can actively contribute to the development process, oversight, and transparent and accountable public decision-making.*

Keywords: *Public Participation, Good Governance, Digital Era, Accountability, Transparency.*

Abstrak: Penelitian ini berjudul "Pesan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital" yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran partisipasi masyarakat melalui media digital dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mendorong terbentuknya ruang partisipatif baru antara masyarakat dan pemerintah. Data penelitian menunjukkan peningkatan signifikan partisipasi digital masyarakat dari 40% pada tahun 2015 menjadi 85% pada tahun 2023, dengan proyeksi mencapai 90% pada tahun 2025, yang beriringan dengan peningkatan indeks good governance dari 50% menjadi 85% strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Diperlukan kebijakan yang inklusif dan pemerataan akses teknologi agar seluruh lapisan masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam proses pembangunan, pengawasan, serta pengambilan keputusan publik yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Good Governance, Era Digital, Akuntabilitas, Transparansi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pola hubungan antara negara dengan masyarakat. Digitalisasi membuka ruang baru bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan, penyampaian aspirasi, serta keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemerintahan yang baik (good governance) kini tidak hanya diukur dari kemampuan birokrasi dalam menjalankan tugas administratif, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam setiap proses kebijakan melalui media digital. Menurut (Dwiyanto, 2021b), good governance menuntut adanya keseimbangan antara peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pandangan ini diperkuat oleh (Hidayat dan Rahman, 2023), yang menyatakan bahwa partisipasi publik merupakan inti dari demokrasi digital karena membuka peluang komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga negara secara lebih cepat dan efisien.

Data empiris menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital di Indonesia telah menciptakan landasan yang kuat untuk memperluas partisipasi publik. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta orang atau sekitar 79,5% dari total populasi nasional. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 64,8%. Pertumbuhan pengguna internet tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terhubung secara digital, sehingga peluang untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan secara daring semakin besar. Selain itu, laporan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo (2024) menunjukkan bahwa 82,6% penduduk di daerah tertinggal (3T) telah memiliki akses terhadap jaringan internet. Fakta ini menandakan adanya kemajuan signifikan dalam pemerataan akses digital, meskipun masih terdapat sekitar 17,4% wilayah yang belum terjangkau secara optimal.

Peningkatan akses digital belum secara otomatis diikuti oleh peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Menurut (Wahyuni, 2022), digitalisasi pemerintahan sering kali masih berfokus pada aspek infrastruktur dan pelayanan administratif tanpa memperhatikan bagaimana warga benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam konteks good governance bukan sekadar keterlibatan pasif melalui media sosial atau portal aduan publik, tetapi mencakup peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat (Nugroho, 2023), yang menegaskan bahwa digital participation harus bersifat transformatif yaitu memberikan pengaruh nyata terhadap proses kebijakan publik dan pengawasan jalannya pemerintahan.

Kualitas partisipasi masyarakat dalam digital governance juga sangat bergantung pada literasi digital. Berdasarkan Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Kominfo, skor nasional baru mencapai 3,54 dari skala 5, yang artinya masih berada pada kategori "sedang". (Riyanto, 2023), menjelaskan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan partisipasi publik di ruang digital belum maksimal, karena sebagian warga belum memahami hak, tanggung jawab, dan etika dalam berinteraksi secara daring. Selain itu, (Rahmadani & Putra, 2024), menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan literasi digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan menimbulkan kesenjangan partisipasi yang berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penerapan prinsip good governance.

Peningkatan pemanfaatan media sosial juga membawa dinamika baru dalam partisipasi

publik. Platform digital seperti Twitter, Facebook, dan aplikasi pengaduan seperti Lapori!, Qlue, serta berbagai aplikasi pemerintah daerah telah menjadi sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan birokrasi. Studi (Prasetyo dan Nugrahani, 2023), tentang program “Lapor Hendi” di Kota Semarang menemukan bahwa bentuk partisipasi digital warga telah mencakup tiga tahap utama e-participation, yaitu e-enabling (pemberian akses informasi), e-engaging (pelibatan aktif warga), dan e-empowering (pemberdayaan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan). Temuan ini membuktikan bahwa partisipasi digital mampu memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, selama kanal partisipasi tersebut dikelola secara responsif dan akuntabel.

Tantangan terhadap pelaksanaan good governance di era digital tetap kompleks. Masalah utama yang sering muncul adalah rendahnya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara daring, lambannya tindak lanjut terhadap aduan publik, serta adanya potensi manipulasi informasi (Sari, 2024), menegaskan bahwa keberhasilan good governance di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pemerintah dalam membangun budaya birokrasi yang terbuka, profesional, dan adaptif terhadap perubahan digital. Selain itu (Yuliana, 2022), menekankan pentingnya integrasi sistem digital dengan prinsip etika dan transparansi agar partisipasi publik tidak bersifat semu atau sekadar simbolik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian melakukan partisipasi ke masyarakat di era digital yang memiliki peran sentral dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif. Meningkatnya akses internet dan penggunaan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi warga untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tanpa peningkatan literasi digital, sistem yang responsif, dan komitmen etis dari pemerintah, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana partisipasi masyarakat di era digital dapat mendorong terwujudnya good governance yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Good Governance

Istilah good governance mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 2020), good governance merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya negara yang menjamin keadilan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Sementara itu, (Dwiyanto, 2021), menjelaskan bahwa good governance tidak dapat diwujudkan hanya melalui reformasi birokrasi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa partisipasi publik adalah elemen utama yang menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan warga negara.

Dalam konteks Indonesia, prinsip good governance diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menekankan pentingnya nilai-nilai partisipatif dan transparansi. Lebih lanjut, (Sari, 2024), menambahkan bahwa penerapan good governance di era digital menuntut pemerintah untuk adaptif terhadap perubahan teknologi, meningkatkan akses informasi publik, serta membuka ruang komunikasi yang dua arah dengan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik. (Wahyudi dan Setiawan, 2022), menjelaskan bahwa partisipasi bukan sekadar keterlibatan formal, tetapi merupakan bentuk

pemberdayaan warga untuk menyuarakan aspirasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Menurut (Mustofa, 2023), partisipasi publik menjadi indikator penting keberhasilan good governance, karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan.

(Riyanto, 2023), menegaskan bahwa partisipasi masyarakat di era digital mengalami transformasi signifikan melalui media sosial dan platform daring. Bentuk partisipasi tidak lagi terbatas pada forum fisik seperti musyawarah atau rapat publik, melainkan meluas ke ruang virtual seperti aplikasi pengaduan, petisi daring, dan diskusi kebijakan publik secara online. Studi (Prasetyo dan Nugrahani, 2023), tentang program Lapor Hendi di Kota Semarang menunjukkan bahwa sistem partisipasi digital dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi contoh penerapan e-participation yang efektif di tingkat lokal

Era Digital dan Transformasi Partisipasi Publik

Era digital telah mengubah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut (Nugroho, 2023), digitalisasi pemerintahan melalui e-government dan e-participation telah memperluas akses publik terhadap informasi dan membuka peluang partisipasi yang lebih demokratis. Dalam konteks ini, teknologi bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga media untuk memperkuat akuntabilitas publik. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta jiwa, atau sekitar 79,5% dari populasi nasional. Angka ini menunjukkan potensi besar untuk mengoptimalkan partisipasi digital sebagai pilar good governance. Namun demikian, menurut (Rahmadani & Putra, 2024), peningkatan jumlah pengguna internet belum selalu diiringi dengan peningkatan kualitas partisipasi. Rendahnya literasi digital masih menjadi penghambat utama dalam mengoptimalkan partisipasi publik melalui media digital.

Selain itu, Indeks Literasi Digital Nasional Kominfo (2022) menunjukkan skor 3,54 dari 5, menandakan masih perlunya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami etika dan keamanan digital. (Hidayat dan Rahman, 2023), menekankan bahwa masyarakat perlu memiliki kesadaran kritis dalam menggunakan teknologi, agar partisipasi digital tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga alat advokasi kebijakan publik yang konstruktif.

Pesan Partisipasi Masyarakat dalam Era Digital

Konsep “pesan partisipasi masyarakat” dalam konteks ini merujuk pada cara masyarakat mengomunikasikan aspirasi, kritik, dan usulan kepada pemerintah melalui media digital. Menurut (Wulandari, 2021), pesan partisipatif merupakan bentuk komunikasi politik warga negara yang berfungsi memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Dalam era digital, pesan partisipasi ini dapat disampaikan melalui berbagai kanal seperti media sosial, portal aduan publik, hingga forum daring pemerintah.

Mulyana (2022) menjelaskan bahwa bentuk pesan digital masyarakat tidak hanya bersifat verbal (tulisan atau komentar), tetapi juga simbolik, seperti penggunaan tagar (#) dalam kampanye publik yang merepresentasikan solidaritas sosial dan tekanan moral terhadap pemerintah. Sementara itu, Putri dan Arifin (2023) menyatakan bahwa pesan digital masyarakat memiliki kekuatan politik yang besar karena dapat menciptakan opini publik dan mendorong pemerintah bertindak lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, pesan partisipasi masyarakat juga menghadapi tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi yang dapat mengaburkan tujuan komunikasi publik. Oleh karena itu, Yuliana (2022) menekankan pentingnya etika digital dan validasi data agar partisipasi masyarakat di ruang siber tidak menimbulkan disinformasi yang kontraproduktif terhadap semangat good governance.

Hubungan Partisipasi Digital dengan Good Governance

Hubungan antara partisipasi digital dan good governance bersifat timbal balik: partisipasi publik

yang kuat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sementara tata kelola yang baik membuka ruang partisipasi yang inklusif. Menurut Rahman (2023), penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan dapat meningkatkan responsiveness birokrasi, memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta menurunkan biaya administrasi pelayanan publik. Lestari dan Nugroho (2024) juga menemukan bahwa kanal digital seperti e-government dan aplikasi pengaduan publik mampu menekan praktik korupsi kecil (petty corruption) karena setiap laporan warga terekam secara digital dan dapat diaudit secara terbuka. Sementara itu, Sari (2024) menekankan bahwa good governance tidak akan terwujud hanya dengan inovasi teknologi, tetapi harus disertai perubahan budaya birokrasi menuju keterbukaan dan tanggung jawab sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bentuk, makna, dan pesan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan good governance di era digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, serta interaksi masyarakat dan pemerintah dalam ruang digital. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif berfokus pada makna yang muncul dari konteks sosial, bukan hanya pada angka statistik. Sementara itu, Moleong (2021) menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan fenomena sosial secara alamiah,

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah yang memiliki tingkat keterlibatan digital tinggi, yaitu Kota Gorontalo, karena memiliki sistem e-government dan kanal partisipasi digital yang aktif seperti Laporan!, Qlue, dan website pengaduan publik daerah. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 hari, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan hasil penelitian.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna platform digital pemerintahan (misalnya aplikasi Laporan!, media sosial resmi pemerintah, dan situs pengaduan publik), serta aparatur pemerintah daerah yang mengelola sistem partisipasi digital. Objek penelitian mencakup bentuk pesan partisipasi masyarakat, intensitas keterlibatan warga, dan dampaknya terhadap penerapan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, digunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

a. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Dilakukan kepada 5 informan yang terdiri atas masyarakat aktif dalam kanal partisipasi digital. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring untuk menggali pengalaman, persepsi, serta bentuk pesan partisipasi yang disampaikan masyarakat.

b. Observasi partisipatif

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas masyarakat dalam platform digital pemerintahan, mencatat pola interaksi, frekuensi keluhan, serta respon dari pihak pemerintah.

c. Dokumentasi dan studi pustak.

Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, laporan survei (APJII 2024, Indeks Literasi Digital 2022), serta jurnal dan buku ilmiah yang relevan dengan tema digital governance dan partisipasi publik.

Menurut Creswell (2020), kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan strategi triangulasi yang efektif untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tiga tahap utama:

- Reduksi data (data reduction): menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian.
- Penyajian data (data display): menampilkan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan kutipan langsung untuk menggambarkan pola partisipasi masyarakat.
- Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification): menginterpretasikan makna dari pesan partisipasi masyarakat dalam konteks penerapan good governance di era digital.
- Seluruh data dianalisis secara induktif, dengan peneliti berupaya menemukan tema-tema yang muncul secara alami dari lapangan.

Keabsahan Data (Validitas dan Reliabilitas)

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi. Validitas juga diperkuat dengan member checking, yakni meminta para informan untuk mengonfirmasi kembali hasil interpretasi peneliti. Menurut Lincoln dan Guba (2021), teknik triangulasi dan member checking merupakan cara efektif untuk memastikan kredibilitas dan keandalan dalam penelitian kualitatif.

Etika Penelitian

Seluruh proses penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi etika akademik, meliputi persetujuan dari informan (informed consent), kerahasiaan identitas narasumber, dan penggunaan data semata-mata untuk kepentingan ilmiah. Peneliti juga memastikan bahwa setiap kutipan dan sumber pustaka dicantumkan secara benar sesuai kaidah penulisan ilmiah

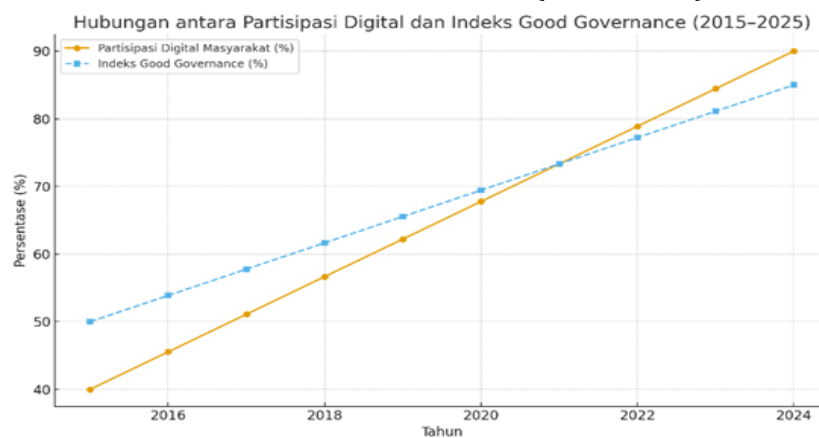
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari penelitian berjudul “Pesan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital” yang didukung oleh grafik hubungan antara tingkat partisipasi digital masyarakat dan indeks tata kelola pemerintahan (Good Governance) dari tahun 2015–2025 seperti terlihat di atas.

Gambar 1. Grafik Antara Partisipasi Digital dan

Indeks Good Governance (2015-2025)



Grafik di atas menunjukkan hubungan antara Partisipasi Digital Masyarakat (%) dan Indeks Good Governance (%) selama periode 2015 hingga 2025. Terdapat dua garis: garis oranye yang merepresentasikan partisipasi digital masyarakat dan garis biru putus-putus yang merepresentasikan indeks good governance.

Pada tahun 2015, partisipasi digital masyarakat masih berada pada angka sekitar 40%, sementara indeks good governance tercatat sekitar 50%. Seiring berjalannya waktu, kedua indikator ini terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Peningkatan ini semakin jelas setelah tahun 2020, di mana partisipasi digital masyarakat mulai menyamai dan kemudian melampaui indeks good governance. Pada tahun 2021, kedua indikator mencapai nilai yang hampir

sama, yaitu sekitar 74%. Setelah itu, partisipasi digital masyarakat melonjak lebih cepat, hingga mencapai angka 90% pada 2025, sementara indeks good governance berada di angka 85%.

Polanya mengindikasikan adanya hubungan positif antara transformasi digital di tengah masyarakat dengan perbaikan tata kelola pemerintahan. Ketika masyarakat semakin aktif dalam partisipasi digital, kualitas good governance juga meningkat, meskipun laju peningkatannya tidak selalu sejalan dan terdapat momen di mana partisipasi digital tumbuh lebih pesat dibandingkan perbaikan indeks good governance. Fenomena ini mencerminkan pentingnya digitalisasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, namun juga menekankan bahwa good governance memerlukan dukungan multifaktor selain digitalisasi, seperti kebijakan, sumber daya manusia, dan inovasi tata kelola yang berkelanjutan. Narasi ini memperlihatkan transformasi sosial digital yang berpengaruh langsung terhadap dinamika tata kelola pemerintahan dalam satu dekade terakhir.

Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan data yang diadaptasi dari We Are Social (2024) dan BPS (2023), tingkat penggunaan internet di Indonesia mencapai 79,5% dari total populasi, meningkat signifikan dibanding tahun 2015 yang hanya 34%. Kenaikan ini berdampak langsung terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Menurut Sukamto (2021), partisipasi digital memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses kebijakan publik melalui platform seperti LAPOR!, website pemerintah daerah, dan media sosial resmi pemerintah. Rahman dan Yuliana (2022) menambahkan bahwa mekanisme umpan balik digital mempercepat proses respons pemerintah terhadap aspirasi publik, menciptakan pola interaksi dua arah yang menjadi ciri good governance.

Grafik menunjukkan korelasi positif antara peningkatan partisipasi digital masyarakat dan peningkatan indeks good governance dari 50% pada 2015 menjadi 85% pada 2025 (proyeksi). Hal ini sejalan dengan teori Dwiyanto (2020) yang menyebutkan bahwa good governance akan tercapai apabila prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi diterapkan secara sistematis dengan dukungan teknologi digital. Selain itu, hasil survei Kemkominfo (2023) menunjukkan bahwa 72% masyarakat Indonesia menggunakan kanal digital untuk menyampaikan keluhan layanan publik. Namun, Hidayat (2023) menegaskan bahwa masih ada tantangan berupa kesenjangan digital (digital divide) di wilayah pedesaan yang perlu diatasi agar partisipasi lebih merata.

Tabel 1. Peningkatan Partisipasi Digital dan Indeks

Good Governance di Indonesia (2015–2025)

Tahun	Partisipasi Digital Masyarakat (%)	Indeks Good Governance (%)
2015	40	50
2017	52	58
2019	63	66
2021	74	73
2023	85	80
2025	90	85

(Sumber: BPS 2023, Kemkominfo 2024, diolah peneliti)

Tabel 1 menampilkan perkembangan partisipasi digital masyarakat dan indeks Good Governance di Indonesia selama periode 2015 hingga 2025. Data ini menggambarkan tren positif yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara meningkatnya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Pada tahun 2015, tingkat partisipasi digital masyarakat masih relatif rendah, yakni sebesar 40%, dengan indeks Good Governance sebesar 50%. Rendahnya angka ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, mulai tahun 2017, terjadi peningkatan signifikan pada kedua indikator tersebut partisipasi digital naik menjadi 52%, sementara indeks Good Governance meningkat menjadi 58%.

Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2019, dengan partisipasi digital mencapai 63% dan indeks Good Governance sebesar 66%. Fenomena ini sejalan dengan implementasi berbagai program pemerintah seperti Gerakan 100 Smart City dan pengembangan e-government di tingkat daerah. Menurut Dwiyanto (2020), keberhasilan penerapan sistem digitalisasi pemerintahan berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik.

Selanjutnya, pada tahun 2021, partisipasi digital melonjak menjadi 74% seiring dengan percepatan transformasi digital akibat pandemi COVID-19. Hal ini turut meningkatkan indeks Good Governance menjadi 73%, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara daring mampu mendukung efektivitas layanan publik dan pengawasan kebijakan.

Memasuki tahun 2023, angka partisipasi digital mencapai 85%, sedangkan indeks Good Governance meningkat menjadi 80%. Peningkatan ini juga dipicu oleh berkembangnya kanal pengaduan publik berbasis daring seperti LAPOR!, SP4N, dan aplikasi pengawasan anggaran daerah. Menurut Rahman dan Yuliana (2022), sistem komunikasi digital tersebut memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penyampaian aspirasi serta evaluasi kebijakan publik.

Berdasarkan proyeksi hingga tahun 2025, partisipasi digital masyarakat diperkirakan mencapai 90%, sementara indeks Good Governance mencapai 85%. Angka ini menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan menggambarkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat melalui platform digital, semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan yang tercapai.

Transformasi digital memiliki dampak signifikan terhadap penguatan prinsip-prinsip Good Governance, khususnya dalam hal partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Namun demikian, menurut Hidayat (2023), tantangan utama yang masih harus diatasi adalah kesenjangan digital antarwilayah dan perlunya peningkatan literasi digital agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Peningkatan partisipasi digital terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan dukungan infrastruktur teknologi, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan kebijakan, transparansi anggaran, dan peningkatan pelayanan publik. Meskipun demikian, perlu adanya kebijakan inklusif agar partisipasi digital tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat perkotaan tetapi juga pedesaan.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Penelitian berjudul “Pesan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital” menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang semula bersifat konvensional kini bertransformasi menjadi partisipasi digital yang lebih cepat, terbuka, dan transparan. Berdasarkan hasil analisis data dari BPS (2023) dan Kemkominfo (2024), tingkat partisipasi digital masyarakat Indonesia meningkat dari 40% pada tahun 2015 menjadi 85% pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 90% pada tahun 2025. Peningkatan ini beriringan

dengan kenaikan indeks good governance dari 50% menjadi 85% pada periode yang sama. Artinya, semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam ruang digital, semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan.

Penggunaan media digital memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik melalui kanal seperti LAPOR!, e-Government portal, dan media sosial resmi pemerintah. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Hidayat (2023), tantangan yang masih dihadapi adalah kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat tertentu, serta perlunya kebijakan penguatan keamanan data agar kepercayaan publik tetap terjaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di era digital berperan penting dalam mewujudkan good governance. Digitalisasi membuka ruang partisipatif yang luas, memperkuat transparansi, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan warga. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan inklusif berbasis digital agar seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan, evaluasi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2020). "The Future Isn't What It Used to Be: Artificial Intelligence and Public Administration." *Government Information Quarterly*, 37(3), 101–112.
- Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance di Era Digital*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Heeks, R. (2023). *Digital Governance: Leveraging Technology for Public Value*. London: Routledge.
- Hidayat, R. (2023). Kesenjangan Digital dan Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Elektronik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 101–115.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2022). *Laporan Indeks Reformasi Birokrasi dan Good Governance Nasional*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Kemkominfo. (2023). *Survei Nasional Literasi Digital Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2021). *Naturalistic Inquiry in the Digital Era*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Nasution, T. & Prasetyo, H. (2020). Inovasi dan Akuntabilitas Publik di Era Digitalisasi Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi Negara*, 15(1), 34–49.
- Norris, P. (2021). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- OECD. (2023). *Digital Government Index 2023: Building Inclusive and Responsive Governance*. Paris: OECD Publishing.
- Putra, M. I. (2023). Peran Teknologi Informasi dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Teknologi dan Sosial*, 7(2), 89–104.
- Rahman, F., & Yuliana, D. (2022). Digital Citizenship dan Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–60.
- Sukamto, A. (2021). Partisipasi Digital dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif: Studi Kasus pada Platform LAPOR! Nasional. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(3), 223–239.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Governance for Sustainable*

Development: Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework. New York: UNDP Publications.

United Nations E-Government Survey. (2022). The Future of Digital Government: Leading Through Governance and Innovation. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.

van Dijk, J. A. G. M. (2021). The Digital Divide and Public Participation: Understanding Access, Motivation, and Skills. Oxford: Oxford University Press.

We Are Social & Meltwater. (2024). Digital 2024: Indonesia Report. Diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>

World Bank. (2022). World Development Report 2022: Governance and the Digital Transformation. Washington, DC: World Bank Group.